BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Konflik sendiri sudah menjadi hal lumrah di kehidupan sosial dan tentu berkaitan dengan kelompok manusia. Ditambah dalam partai politik yang kerap mengalami perbedaan pendapat maupun persaingan kekuasaan. Meskipun dalam partai memiliki tujuan dan visi misi yang sama, tidak dapat dipungkiri akan timbulnya konflik. Sikap dan tindakan partai yang dikeluarkan oleh ketua umum ataupun perebutan kekuasaan partai, cenderung menjadi sumber konflik. Konflik politik bermakna perbedaan pendapat antar elite negara dan perbedaan pendapat antar kelompok dalam lembaga-lembaga politik dalam proses pengambilan keputusan.[1] Konflik antar elite negara seperti perbedaan pendapat antara Menteri Kabinet dalam proses pengambilan keputusan suatu kebijakan. Konflik antar kelompok dalam lembaga politik politik, seperti perbedaan pendapat antara fraksi di DPR atau dalam lembaga politik lainnya dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu isu[2]. Di sini partai politik, yaitu Golkar Kota Bekasi termausk lembaga politik.

[1] Jalal, Asran, "Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras Tahun 2018 dan Tahun 2021. *Populis, Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 7, No. 2, Tahun 2022.
[2] Jalal, Asran (2019). *Politik Desentralisasi di Indonesia: Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta: Penjuru Ilmu.

Bukan hal yang baru apabila Partai Golkar selalu memperlihatkan sesuatu yang menarik terutama dalam permasalahan konflik internalnya. Bahkan di awal reformasi saat Munaslub Golkar tahun 1998, telah terbagi menjadi dua faksi yaitu faksi Akbar Tandjung dan faksi Edi Sudrajat dalam merebutkan jabatan Ketua Umum Partai. Ataupun pada tahun 2014 terpecah kembali ketika menjelang Pilpres dengan adanya dua kubu dalam internal, yakni kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Jusuf Kalla. Konflik ini diawali dari Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar memerintahkan kepada para kader untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta, bukan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jusuf Kalla juga merupakan mantan Ketua Umum Golkar periode 2004-2009 sekaligus elite senior Golkar. Faktanya memang diperlukan adanya dinamika demokrasi di dalam tubuh internal partai itu sendiri, sehingga menunjukkan bahwa setiap kader diberikan hak yang sama dalam berpendapat atau menyalonkan diri. Akan tetapi dengan banyaknya kasus konflik di Golkar dari awal era reformasi hingga saat ini, unsur konflik internal seakan-akan sudah menjadi "makanan pokok" bagi partai tersebut.

Begitu juga yang terjadi di Kota Bekasi yang memiliki basis Golkar cukup kuat dan solid. Hal ini terbukti dengan dominasi Partai Golkar pada Pilkada Wali Kota Bekasi. Kemenangan dua tokoh Golkar yang berhasil memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai wali kota, yaitu Akhmad Zurfaih (Wali Kota Bekasi Periode 2003-2008) dan Dr. Rahmat Effendi (Wali

Kota Bekasi Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2022). [3]Rahmat Effendi atau memiliki nama sapaan Bang Pepen merupakan salah satu tokoh Golkar yang cukup disegani dan memiliki kekuatan besar di Kota Bekasi, mengingat ia telah berhasil menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Bekasi selama dua periode berturut-turut, selain itu juga Bang Pepen merupakan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Oleh karena itu, guna mempertahankan tahta partai, Golkar sudah mempersiapkan sejumlah nama perwakilan yang akan masuk ke dalam bursa calon Wali Kota Bekasi tahun 2024 mendatang dan diharapkan dapat meningkatkan tingkat elektabilitas partai. Sebenarnya banyak nama yang beredar di masyarakat, akan tetapi Ade Puspitasari yang kerap kali digadang-gadang sebagai penerus kemenangan Golkar di Kota Bekasi.

Ade Puspitasari merupakan anak kandung dari Bang Pepen, sehingga tidak heran apabila Golkar memanfaatkan latar belakang Ade untuk mendobrak kredibelitasnya dan kembali mempertahankan eksistensi Golkar di Kota Bekasi. Pilkada Wali Kota Bekasi selanjutnya juga dibarengi Pemilu yang keduanya dilaksanakan pada tahun 2024. Diharapkan melalui *framing* Ade sebagai anak Bang Pepen, dapat lebih mudah memperkuat dan mendapatkan simpatisan untuk memberikan suara kepada Golkar saat pemilu nanti. Maka dari itu, untuk mencapai jabatan wali kota, akan lebih baik dan mudah apabila Ade dapat menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, serupa dengan karier politik ayahnya Rahmat Effendi, sehingga diharapkan mampu

[3] *WaIi Kota dan WakiI WaIi Kota Bekasi dari Masa ke Masa*. 2022, Diakses pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 21.15 WIB, dari https://bekasikota.go.id/pages/wali-kota-dan-wakil-wali-kota-bekasi-dari-masa-ke-masa

membentuk kader yang solid untuk pro terhadapnya dalam penyalonan bakal calon Wali Kota Bekasi.

Maka dari itu, diperlukan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) guna menetapkan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, sekaligus regenerasi pengurus. Musda merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan partai sesuai dengan tingkatannya. DPD Golkar Kota Bekasi seharusnya menyelenggarakan Musda pada 5 Agustus tahun 2020, karena Musyawarah Nasional sudah diselenggarakan pada Desember 2019. Hal ini berdasarkan Juklak No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Musyawarah Daerah tingkat kota/kabupaten dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan setelah Musyawarah Nasional.

Akan tetapi, jalan Ade tidak semulus yang dibayangkan dalam menduduki jabatan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Gelaran musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi harus ditunda melalui surat dari DPP ditujukan kepada DPD Provinsi Jawa Barat dengan tujuan tembusan kepada DPD Kota Bekasi, untuk menunda Musda V Golkar Kota Bekasi atas rekomendasi Mahmakah Partai Golkar, dengan pertimbangan masih terdapat persengketaan kepemilikan kantor DPD Golkar Kota Bekasi yang dianggap masih belum tuntas oleh pusat.

Hingga akhirnya, Musda V Golkar Kota Bekasi dapat digelar tanggal 29 Oktober 2021 yang justru berujung dualisme, di mana terdapat dua nama calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Periode 2020-2025 yang mengklaim sudah terpilih secara sah, bahkan Musda Golkar Kota Bekasi

dilaksanakan dua kali pada hari yang sama, namun lokasi yang berbeda. Dua nama yang dimaksud adalah Ade Puspitasari dan Nofel Saleh Hilabi. Musda V Golkar kubu Ade, dilaksanakan di Gedung Graha Bintang, sedangkan kubu Nofel menyelenggarakan musda di Hotel Horison, Bekasi.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa telah terjadi persengketaan atas kepemilikkan kantor DPD Golkar Kota Bekasi yang melibatkan ayah Ade, yaitu Rahmat Effendi. Polemik ini diawali tahun 2019 dari adanya pemasangan iklan Gedung DPD Kota Bekasi pada situs jual beli online. Pemilik lahan dan gedung tersebut bernama Andy Salim. Melalui agen penjual, Andy berniat menjual atau menyewakan tanah dan bangunan tersebut dengan dilengkapi sertifikat Hak Guna Bangun, dengan harga sewa Rp 1 M per tahun dan harga jual Rp 46 M. Sedangkan menurut Golkar Bekasi tidak tahu terkait dijualnya kantor DPD, seperti yang dikatakan Dariyanto selaku Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD Golkar Kota Bekasi, *"Kepengurusan DPD partai Golkar tidak ada yang memasang iklan tersebut,"*.[4] Lebih lanjut, Rahmat Effendi mengaku aset gedung tersebut memang bukan secara mutlak milik DPD Golkar Kota Bekasi, karena sudah dijual sejak tahun 2001 pasca pemekaran wilayah Bekasi menjadi kota dan kabupaten, tetapi menurutnya DPD Golkar Kota Bekasi masih memiliki hak dalam kepemilikan aset tersebut. Atas kasus ini, Rahmat Effendi menggugat di

[4] *PenjuaI Gedung DPD Golkar Bekasi di Situs OnIine Angkat Bicara*, (Mawardi, 2020). Diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 15.16 WIB, dari https://news.detik.com/berita/d-4874919/penjual-gedung-dpd-golkar-bekasi-di-situs-online-angkat-bicara.

Pengadilan Negara (PN) Kota Bekasi dengan pihak tergugat adalah Andy Salim dan hingga sekarang masih diproses dalam persidangan selanjutnya.

Tidak berakhir di sana saja, Rahmat Effendi harus ditangkap oleh KPK pasca OTT pada awal tahun 2022. Pada kasus ini, bukan hanya melibatkan Bang Pepen seorang, melainkan para elite birokrat pemkot dan para pengusaha juga berperan. KPK menetapkan Bang Pepen sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, pasca ditemukan barang bukti berupa uang dengan jumlah miliaran dalam pecahan rupiah di rumah dinas wali kota tersebut. Di dalam kegiatan tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan beberapa pihak yang berjumlah sekitar 12 orang.

Kedua kasus yang melibatkan Rahmat Effendi, tentu mengakibatkan merosotnya kepercayaan para kader terhadapnya. Sebagaimana sudah dijelaskan, Bang Pepen merupakan sosok politikus yang kuat pengaruhnya, baik di pemerintahan Kota Bekasi maupun di dalam internal Partai Golkar. Pasca ditahannya Bang Pepen, posisi Ade sebagai anak kandung, pasti merasakan dampaknya yaitu muncul lawan politik yang kontra terhadap Rahmat Effendi dan berdampak juga pada simpatisan ayahnya selama ini.

Meski demikian, tingkat popularitas Ade Puspitasari lebih tinggi dibandingkan Nofel. Bukan hanya bersanding status anak wali kota, melainkan Ade sudah aktif dalam ranah keorganisasian, di antaranya menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bekasi, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi, dan Ketua Kwarcab Pramuka Kota Bekasi.

Lebih lanjut, sosok Ade menurut dari Pengamat Politik Universitas Juanda Bogor, Gotfridus Goris Seran MA, [5]merupakan politisi muda yang sudah teruji baik karena berhasil menduduki kursi DPRD Prov. Jawa Barat dan terpilih menjadi anggota DPRD. *"Bahkan saat ini dipercaya menjadi Plt. Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, meskipun masih muda dengan demikian kapasitas ketokohan politiknya telah teruji,"* imbuhnya. Dengan keberhasilan Ade, dapat diartikan bahwa ia memiliki basis massa di akar rumput yang cukup kuat di kota Bekasi.

Rekam jejak Nofel Saleh Hilabi tidak kalah bagusnya, ia sudah lama berkecimpung di dunia bisnis dan politik. Nofel merupakan CEO sekaligus pendiri PT. Sabika Group yang bergerak pada bidang usaha pembiayaan, pengembang perumahan, kontruksi, dan desain interior. Selain itu, di dunia politik Nofel pernah menyalonkan diri sebagai anggota DPR RI tetapi gagal, namun karier organisasinya cukup cemerlang dengan menjabat Ketua Kompartmen BUDPAR Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) JAYA (Tahun 2008-2011) serta dilanjutkan sebagai anggota aktif ESDA DPP Partai Golkar Jakarta (Tahun 2011-2015). Kegagalan Nofel dalam Pileg 2019, diisukan sebab ijazah miliknya yang terindikasi palsu. Menurut Goris, Nofel masih belum memiliki basis massa yang mengakar, sehingga dipastikan tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan suatu organisasi di Kota Bekasi,

[5] *Dosen FlSlP UNlDA Bogor Mengukur Peta Kekuatan Politik Jelang Musda GoIkar Kota Bekasi,* Djuanda University. 2020, Diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 4.06 WIB, dari https://www.unida.ac.id/artikel/dosen-fisip-unida-bogor-mengukur-peta-kekuatan-politik-jelang-musda-golkar-kota-bekasi.html

belum lagi Nofel ber-KTP di wilayah Depok[6]. Ia juga masih belum mampu untuk mendapatkan kursi di DPR RI, yang membuktikan karir politknya yang masih belum terlalu banyak.

Dualisme Golkar kota Bekasi menurut Aria Girinaya atau akrab dipanggil Giri yang merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jawa Barat sekaligus Plt Ketua Golkar Bekasi dapat terjadi akibat kondisi di lapangan perhelatan Musda V, di mana pihak Nofel merasa tidak diberikan ruang cukup untuk masuk ke arena Graha Bintang, bahkan disebutkan bahwa kubu Nofel sampai harus membawa pasukan pengamanan dari luar sehingga menciptakan suasana tidak kondusif. Selanjutnya, ia mendapatkan kabar bahwa kubu Nofel berencana menggelar musda di tempat lain, yaitu Hotel Horison dan diklaim sudah disetujui oleh Ade Ginanjar selaku Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat. dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Giri juga menyempatkan hadir pada Musda faksi Nofel setelah hadir di Musda Graha Bintang dan menyatakan bahwa seluruh ketetapan hasil Musda akan diserahkan kepada Mahkamah Partai untuk mencegah bentrok antar dua kubu[7]. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim bahwa kemenangan, baik Ade maupun Nofel sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi secara aklamasi. Selain itu, terdapat hal yang menarik pada gelaran musda V Golkar di Hotel Horison, sosok Andy Salim menghadiri musda tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap Nofel. Ia juga secara terang-terangan mengizinkan para kader Golkar Kota Bekasi untuk

[6] *Ibid*
[7] *Penjelasan Golkar Jabar soal Dualisme Musda di Kota Bekasi* (Ramadhan, 2021). Diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 21.55 WIB, dari https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5791408/penjelasan-golkar-jabar-soal-dualisme-musda-di-kota-bekasi.

kembali menggunakan Gedung DPD Golkar Kota Bekasi miliknya, dengan syarat apabila diketuai oleh Nofel Saleh Hilabi. Konflik ini juga terdengar sampai Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto yang mengamanatkan untuk kedua belah pihak, yakni Ade Puspitasari dan Nofel Saleh Hilabi untuk bertarung merebut hati para Pengurus Kecamatan (PK), namun tetap menjaga kondusivitas.[8]

Perkara konflik internal Golkar Kota Bekasi berujung ke peradilan Mahkamah Partai terkait pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Golkar Kota Bekasi. Di mana pihak Nofel melalui Kuasa Hukumnya, Fahri Bachmid menyatakan musda yang dilaksanakan di Graha Bintang tidak konstitusional dan illegal dikarenakan surat keputusan diterbitkan secara tidak prosedural. Pihaknya juga sudah mengajukan permohonan secara resmi kepada Mahkamah Partai Golkar terkait Permohonan Penetapan Penundaan Pemberlakuan Surat Keputusan (SK) SKEP- 75/GOLKAR/XI/2021 Tertanggal 1 November 2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi Masa Bakti 2020-2025. Pada tanggal 28 November 2021, kuasa hukum Nofel memberikan keterangan bahwa sidang perselisihan partai sedang diproses dan terdaftar pada Register Perkara No. 44/PI-GOLKAR/XI/2021 serta terdapat sejumlah nama yang menjadi pihak termohon yang kebanyakan merupakan panitia Musda V versi Graha Bintang. Adapun kubu Nofel berpandangan bahwa DPD Partai Golkar Jawa Barat telah

8 *Ibid.*

bertindak secara tidak proporsional melalui pengabaian hasil Musda yang dimenangkan olehnya. Tidak sampai di sana, Nofel dan pendukungnya mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Kota Bekasi tanggal 16 Juli 2022 dengan agenda sidang akan digelar pada tanggal 5 Oktober 2022.

Pada sidang berlangsung, pihak Nofel didampingi oleh para kader dan tokoh senior Golkar Kota Bekasi. Di mana saat berjalannya sidang terdapat pertanyaan dari pimpinan sidang terkait kepesertaan Musda kubu Ade yang dihadiri oleh Pengurus Kecamatan (PK) dengan SK yang sudah kadaluarsa. Hal ini membuat optimis kubu mereka, bahwa hasil sidang akan dikeluarkan secara adil dan sesuai harapan. Namun pada tanggal 15 September 2022, Majelis Hakim menolak gugatan Nofel. Hendra Aris selaku Ketua Tim Bidang Hukum DPD Golkar Kota Bekasi sekaligus simpatisan Ade mengatakan bahwa pasca persidangan dan pemeriksaan secara adil dan professional, telah dikabulkan eksepsi tergugat bahkan penggugat yakni kubu Nofel tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas gugatannya[9]. Pihak Ade Puspitasari dengan tegas menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan maupun gerakan gelap yang berdasarkan "halusinasi" yang tidak mendasar. Menanggapi hal tersebut, Nofel mengatakan bahwa hasil putusan sudah dipelintir dengan opini seolah-olah sudah dimenangkan oleh kubu Ade. Menurutnya tidak ada bunyi yang menyatakan kemenangan salah satu pihak dan hanya disebutkan bahwa gugatan belum dapat diterima karna kurangnya

[9] *Gugatan Nofel Saleh Hilabi Tak Diterima Pengadilan, Jabatan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Dipegang Ade Puspitasari* (Joy Andre, 2022). Diakses pada tanggal 13 Oktoberi 2022 Pukul 19.00 WIB, dari https://amp.kompas.com/megapolitan/ gugatan-nofel-saleh-hilabi-tak-diterima-pengadilan-jabatan-ketua-dpd

berkas. Ditambah putusan dari Mahkamah Partai masih belum ada, sehingga ia dan tim hukum akan mengajukan kembali gugatan baru di Mahkamah Agung. Fahri juga sepakat bahwa putusan perkara masih belum menjadi akhir dari sengketa kepengurusan, mengingat masih ada upaya kasasi bagi para pihak. Ditambah belum adanya putusan hukum dari Mahkamah Partai Golkar terkait kasus tersebut.

Penjelasan di atas, memberikan gambaran bagaimana dinamika konflik yang terjadi pada tubuh internal Golkar Kota Bekasi. Sehingga menjadi pertanyaan, terkait sumber konflik dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan resolusi konflik, mengingat kubu Nofel masih belum puas terhadap putusan dari pengadilan negeri hingga saat ini.

Urgensi dari penelitian ini adalah posisi Golkar yang merupakan partai politik besar dan memiliki eksistensi yang tinggi serta sudah banyak mengalami perselisihan internal di dalam partai, justru belum mampu menyelesaikan konflik di tingkat kota. Terdapat kasus dualisme yang pernah terjadi di dalam internal Golkar Pusat pada tahun 2014, yakni terdapat dua kepengurusan dari kepemimpinan Abu Rizal Bakrie dan kepemimpinan Agung Laksono. Kasus ini hampir serupa dengan apa yang terjadi di dalam kepengurusan Kota Bekasi.

Sedikit penjelasan terkait dualisme yang sudah disebutkan di atas. Bahwa dualisme ini terjadi gugatan antar pihak berkonflik dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, resolusi konflik melalui peradilan tidak menemukan konsensus hingga Mahkamah

Partai Golkar pada bulan Januari 2016 menunjuk kedua tokoh senior Golkar, B.J. Habibie dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin tim transisi Partai Golkar sebagai upaya rekonsiliasi dengan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hingga akhirnya, dualisme berakhir dengan penunjukkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar berdasarkan Munaslub Bali dan menetapkan jabatan Ketua Dewan Pakar Golkar kepada Agung Laksono, sedangkan Abu Rizal Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat dari masing-masing pihak.

Dapat dilihat bahwa dualisme di tingkat Golkar Pusat menjadi cerminan bahwa dinamika yang harus dihadapi membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi dengan pengalaman di tahun 2014 sampai 2016, seharusnya bekal dan pembelajaran yang dimiliki Golkar sudah cukup banyak dalam menyelesaikan maupun menghadapi kasus yang sama di tingkat kota terutama Kota Bekasi yang belum menemukan titik temu sampai akhir tahun 2022.

Sebuah partai yang di dalamnya terdapat dualisme kepemimpinan, tentu berdampak pada citranya di masyarakat. Partai politik yang berfungsi sebagai pengatur konflik, justru memiliki permasalahan internalnya. Apabila mengaitkan dengan masyarakat, akan tertuju pada pemilihan. Di Kota Bekasi, Golkar dinilai menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan. Terpilihnya Rahmat Effendi sebagai wali kota, dua periode berturut-turut menunjukkan bahwa basis Golkar di Kota Bekasi cukup solid, walaupun pada pileg 2019 lalu Golkar mengalami penurunan di posisi ketiga, di mana kalah suara dari

PKS dan PDIP. Dengan demikian, apabila dualisme dibiarkan berlarut-larut, maka dapat mempengaruhi eksistensi Golkar di Kota Bekasi. Hasil yang kurang memuaskan di Pileg 2019 Kota Bekasi dapat menjadi peringatan Golkar untuk segera menyiapkan strategi dan menguatkan kepengurusan secara solid guna menghadapi tahun politik.

Maka dari itu, penulis akan meneliti dan mengkaji fenomena konflik yang terjadi di dalam tubuh Golkar Kota Bekasi dalam bentuk proposal penelitian berjudul *"Konflik Politik: Dualisme Kepemimpinan Internal DPD Partai Golongan Karya Kota Bekasi Tahun 2022-2022."*

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai dualisme dalam tubuh Golkar Kota Bekasi dapat dirumuskan masalahnya, yaitu:

1. Apa Faktor Penyebab Konflik Internal Golkar Kota Bekasi antara Ade Puspitasari dan Nofel Saleh Hilabi?
2. Bagaimana Proses Konsensus Antara Ade Puspitasari dan Nofel Saleh Hilabi?

1.3.Tujuan Penelitian

Merujuk pada berbagai masalah yang sudah dirumuskan, terdapat tujuan dari penelitian yang akan dilakukan guna menjawab pertanyaan di atas, yaitu:

1. Memahami Faktor Penyebab Konflik Internal Golkar Kota Bekasi antara Ade Puspitasari dan Nofel Saleh Hilabi;
2. Mengetahui Proses Konsensus Antara Ade Puspitasari dan Nofel Saleh Hilabi.

1.4.Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat ataupun berguna yang mengarah terhadap signifikansi, sebagai berikut.

a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dan pengetahuan baru mengenai kajian konflik internal partai dan dualisme kepemimpinan, sehingga penelitian sejenis berikutnya dapat digunakan sebagai kerangka acuan teoritis mendatang;
b. Secara akademis, penulis berharap melalui hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi program studi ilmu politik, terutama pada mata kuliah partai politik Indonesia;
c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai sumber acuan bagi para pihak terkait dan menjadi salah satu pedoman kinerja partai politik di Indonesia dalam menyelesaikan konflik internal dan upaya konsolidasi;
d. Secara sosial, peneliti berharap melaui adanya peneliti ini dapat digunakan oleh masyarakat terutama Kota Bekasi yang mengikuti kegiatan politik sebagai bahan acuan;
e. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan menggunakan pendekata, teknik, dan metode-metode lainnya.

1.5.Sistematika Tulisan

BAB I : Pada bab ini akan menjelaskan mengenai uraian

permasalahan mengenai konflik internal Partai Golkar Kota Bekasi dan penyebab dari dualisme ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Adapun terdapat rumusan masalah dan tujuan serta manfaat dari penelitian, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Selain itu, penulis juga menguraikan metode penelitian meliputi pendekatan, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data serta kerangka berpikir.

BAB II : Di dalam bab dua penulis akan menyajikan studi terdahulu dengan tema dan kajian terkait yang bertujuan untuk pembanding antara kajian sebelumnya. Selain itu, penulis juga memaparkan teori-teori relevan untuk membantu menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III Bab ketiga akan menjelaskan terkait metode penelitian yang termasuk waktu, tempat dan lokasi penelitian. Serta cara dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data.

BAB IV : Pada Bab ke-empat, akan tersajikan mengenai gambaran umum Partai Golongan Karya terutama di Kota Bekasi dan profil dari Ade Puspitasari serta Nofel Saleh Hilabi.

BAB V : Di dalam bab ini akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian dengan memaparkan hasil temuan data di lapangan melalui sumber literatur maupun

wawancara pihak terkait.

BAB VI : Pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang dilakukan.